

Belanja Modal- Pemprov Sulsel Siapkan 4 Paket Proyek Saluran Irigasi Rp 12 M di 2024



Foto: Noval Dhwinuari Antony-detikcom

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7175162/pemprov-sulsel-siapkan-4-paket-proyek-saluran-irigasi-rp-12-m-di-2024>

Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) menyiapkan 4 paket proyek saluran irigasi senilai Rp 12,490 miliar di tahun 2024. Proyek irigasi tersebut tersebar di Kabupaten Wajo, Sinjai, Bulukumba, dan Bone.

"Untuk tahun 2024 ada 4 irigasi yang istilahnya peningkatan dan rehabilitasi," ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (SKCTR) Sulsel Andi Darmawan Bintang kepada **detikSulsel**, Sabtu (3/2/2024).

Darmawan atau kerap disapa Andi Wawan menjelaskan proyek peningkatan irigasi yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas struktur dari saluran irigasi yang akan dikerjakan. Sedangkan rehabilitasi hanya sekadar memperbaiki salurannya.

"Kalau peningkatan, berarti ditingkatkan dia punya lining, dia punya saluran dari saluran tanah menjadi saluran pasangan batu. Kemudian rehabilitasi, artinya diperbaiki baik yang berstruktur tanah maupun yang berstruktur pasangan batu," jelasnya.

Dia menyebut irigasi yang ditingkatkan strukturnya terletak di Kabupaten Wajo. Sementara untuk rehabilitasi tersebar di 3 daerah yakni Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bone.

"Untuk peningkatan, di Wajo itu daerah irigasi Cilellang. Kemudian rehabilitasi ada 3 daerah irigasi yaitu daerah irigasi Bongki-bongki di Bulukumba, Aparang di Sinjai, kemudian Coppobulu di Bone," bebernya.

Andi Wawan menjelaskan pengerjaan keempat proyek irigasi itu dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 12,49 miliar. Dia menyebut anggaran masing-masing proyek berbeda.

"Sumbernya itu dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus. Dananya itu sekitar Rp 12,48 miliar totalnya untuk 4 irigasi," tuturnya.

"Untuk irigasi Cilellang itu Rp 6,4 miliar. Daerah Bongki-bongki sekitar Rp 3,09 miliar, Apparang Rp 2,2 miliar. Dan sisanya Coppobulu di Bone sekitar Rp 800 juta," lanjut Andi Wawan.

Dia memaparkan pengerjaan 4 proyek irigasi itu rencananya dikerjakan dalam waktu dekat. Semua proyek itu ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.

"Bulan ini atau paling lambat bulan depan dimulai dan diproyeksikan selesai bulan 9 atau 10 kalau tidak ada hambatan," bebernya.

Wawan menambahkan peningkatan struktur dan rehabilitasi keempat saluran irigasi itu telah dicantumkan ke dalam perencanaan di Dinas SKCTR. Setidaknya ada tiga kategori saluran yang telah dipetakan dalam perencanaan tersebut.

"Jadi dalam saluran itu ada tiga jenis saluran. Saluran primer, sekunder, dan tersier. Itu dilihat dalam perencanaan kita, yang mana mengalami kerusakan, itu direhab. Yang mana tanah, itu yang ditingkatkan. Ada ki di kantor datanya," ucapnya.

Andi Wawan mengatakan saluran irigasi yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel sebanyak 38 saluran dengan total luas 54 ribu hektare. Hanya saja, dia tak menyebutkan secara rinci kategori dari masing-masing saluran irigasi tersebut.

"Total yang menjadi kewenangan kita itu 54 ribu hektare. Jumlahnya itu 38 (saluran)," pungkasnya.

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7175162/pemprov-sulsel-siapkan-4-paket-proyek-saluran-irigasi-rp-12-m-di-2024>
2. <https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.